

SKRIPSI

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN
ANGGARAN 2018 – 2021**



NAMA : IDA AYU PUTU JYOTISNA GARBANIA

NIM : 1815644100

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN
ANGGARAN 2018 – 2021**

**IDA AYU PUTU JYOTISNA GARBANIA
1815644100**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pelaksanaan asas desentralisasi guna mewujudkan otonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali terlihat belum sepenuhnya mampu menggali sumber pendapatan daerah yang kedepannya akan menunjang keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Data keuangan yang tertulis dan disajikan tidak cukup untuk memberikan informasi yang memadai mengenai kinerja pengelolaan keuangan pada suatu daerah.

Tujuan penelitian ini adalah menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Denpasar tahun 2018-2021 yang diukur melalui perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan. Analisis Rasio Keuangan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Denpasar pada tahun 2018-2021 tergolong masih rendah di beberapa rasio yakni pada Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Pertumbuhan, Sedangkan beberapa rasio lainnya yakni Rasio Efektifitas, Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Rasio Keserasian Belanja Modal menunjukkan Kinerja Keuangan yang baik. Terlihat kondisi kemandirian daerah yang rendah dan tinggi akan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Selain itu juga pemerintah daerah belum bisa mengefisienkan keuangan daerahnya sehingga lebih besar belanja daerah daripada pendapatan daerah. Tingkat perkembangan pengelolaan keuangan daerah bisa dikatakan kurang baik, oleh karena penurunan pendapatan setiap tahun selama waktu yang sudah diperhitungkan.

Kata Kunci: rasio keuangan; laporan realisasi anggaran; kinerja keuangan daerah

***FINANCIAL RATIO ANALYSIS IN ASSESSING FINANCIAL
PERFORMANCE OF DENPASAR CITY GOVERNMENT FOR THE
YEAR 2018 – 2021***

**IDA AYU PUTU JYOTISNA GARBANIA
1815644100**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The execution of the standard of decentralization with regards to understanding the local independence of rule/city in the Province of Bali has not been completely ready to investigate provincial pay sources which will uphold the outcome of carrying out territorial independence. Monetary information written in the Regional Government Budget isn't adequate to give sufficient data with respect to the monetary administration execution in a specific locale.

This exploration looked to evaluate the presentation of territorial monetary administration in Denpasar City during 2018-2021, as estimated by the local monetary reliance proportion, adequacy proportion, productivity proportion, the provincial consumption similarity proportion, the level of financial decentralization proportion and development proportion. Monetary Ratio Analysis utilizing the Budget Realization Report can be an estimating instrument for evaluating the monetary exhibition of nearby government.

The exploration results uncovered that the monetary administration execution of Denpasar City during 2018-2021 still generally low in a few proportions explicitly the territorial monetary reliance proportion, productivity proportion, the level of monetary decentralization proportion and development proportion, while viability proportion and the local consumption similarity proportion show great monetary execution. It tends to be seen from its low territorial independence and its high reliance on the focal government. Furthermore, the territorial government has not had the option to smooth out the local funds in which provincial consumptions were more prominent than provincial incomes. The development pace of provincial monetary administration can be sorted as bad, since there is a lessening in pay consistently during the estimation time of the financial year.

Keywords: financial ratio; budget realization report; regional financial performance

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN
ANGGARAN 2018 – 2021**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA: IDA AYU PUTU JYOTISNA GARBANIA
NIM : 1815644100**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

2022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ida Ayu Putu Jyotisna Garbania
NIM : 1815644100
Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja
Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran
2018 – 2021
Pembimbing : I Made Bagiada, SE.,M.Si, Ak
I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak
Tanggal Uji : Jumat, 12 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 12 Agustus 2022


1E2D2AKX037938496
Jyotisna Garbania

SKRIPSI

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN
ANGGARAN 2018 – 2021**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : IDA AYU PUTU JYOTISNA GARBANIA
NIM : 1815644100**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak.
NIP. 197512312005011003



I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak
NIP. 197808292008011007

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA



I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018 – 2021

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

12 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Made Bagiada, SE., M.Si., Ak.
NIP. 197512312005011003

ANGGOTA:



1. Ketut Arya Bayu Wicaksana, SE., M.Si., Ak.
NIP. 197704172005011002



2. I.G.A Oka Sudiadnyani, SE., M.Si., Ak.
NIP. 197611082002122001

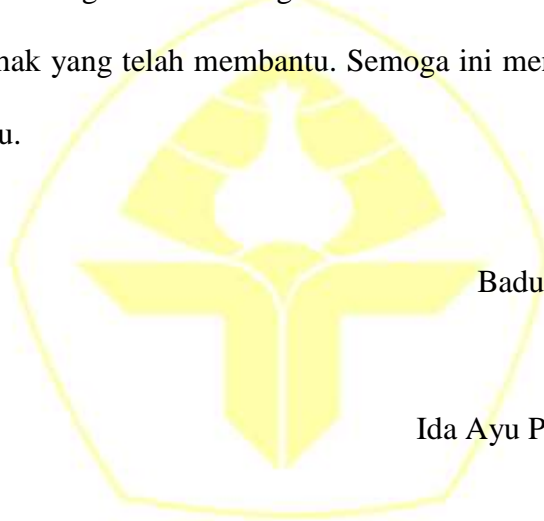
KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial. Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini akan diucapkan terima kasih kepada :

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melanjutkan Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas jurusan untuk menunjang pembuatan skripsi.
3. Cening Ardina, S.E., M.Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang telah memberikan semangat dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. I Made Bagiada, SE.,M.Si, Ak., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan untuk menggali informasi serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi pada penelitian ini.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Badung, 12 Agustus 2022

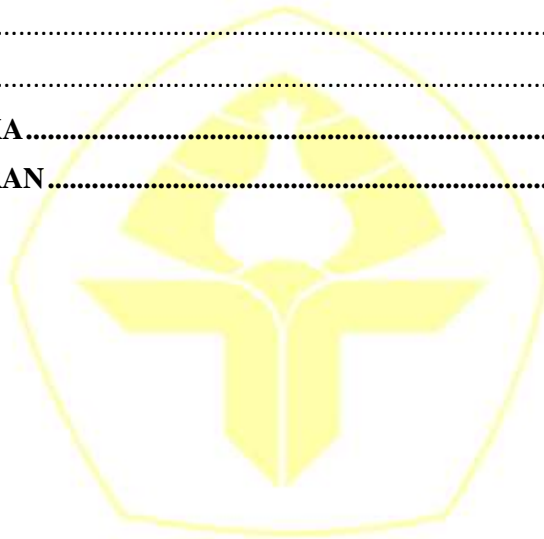
Ida Ayu Putu Jyotisna Garbania

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA TERAPAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori	9
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	9
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	10
3. Kinerja Keuangan Daerah	11
4. Parameter Rasio Keuangan dalam Pemerintah Daerah	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	17
C. Alur Pikir	19
D. Pertanyaan Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
C. Sumber Data.....	22

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	23
E. Keabsahan Data	23
F. Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Deskripsi Hasil Penelitian	27
B. Pembahasan dan Temuan	29
C. Keterbatasan Penelitian	33
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	34
A. Simpulan	34
B. Implikasi	35
C. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
DAFTAR LAMPIRAN.....	39



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2018 – 2021	5
Tabel 1. 2 Penjabaran dari Realisasi Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 - 2021	6
Tabel 2. 1 Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah	13
Tabel 2. 2 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	14
Tabel 2. 3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	14
Tabel 2. 4 Kriteria Keserasian Belanja Daerah.....	15
Tabel 2. 5 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	16
Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan Analisis Rasio Keuangan	28



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir.....	20
-----------------------------	----



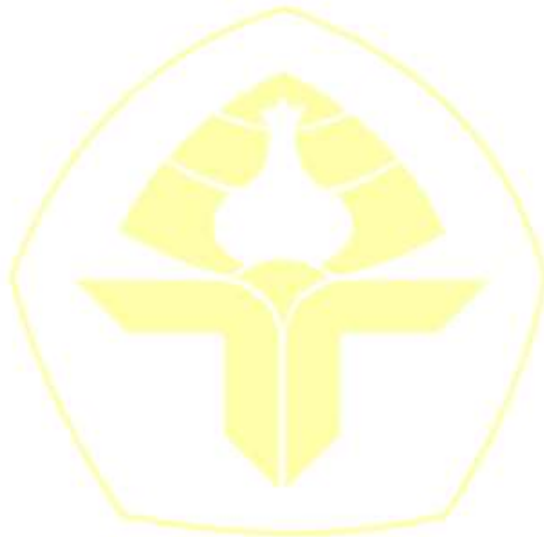
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2019

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2020

Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2021

Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Daerah



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah adalah Lembaga tertinggi yang diberikan kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Pemerintah terbentuk untuk menjalankan aktivitas publik sehingga lembaga pemerintah tidak mencari laba. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola potensi daerah yang dimilikinya seperti meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat daerah yang sejahtera, pemerintah pusat melakukan salah satu upaya dengan menyelenggarakan asas desentralisasi yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

“Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.”

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asas desentralisasi guna mewujudkan otonomi daerah yaitu masalah keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat riskan dan sering terjadi penyelewengan. Keadaan tersebutlah yang membuat pengelolaan keuangan daerah perlu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban yang dilakukan harus memuat informasi yang jelas mengenai keadaan dari kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Kinerja pengelolaan keuangan daerah mencerminkan hasil pencapaian kerja pada bagian keuangan daerah yang mencakup kegiatan dalam merealisasikan APBD serta dilakukan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan (RISWAN & Affandi, 2014)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 menyatakan struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga komponen yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Menurut (Hanum, 2011) Sumber Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain, Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil,

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Kota Denpasar merupakan salah satu Kota yang ada di Indonesia tepatnya Ibu Kota dari Propinsi Bali. Kota Denpasar sedang giat-giatnya melakukan pembangunan daerah guna menunjang perkembangan daerah. Dengan adanya pembangunan di berbagai sektor diharapkan pembangunan tersebut dapat berjalan lurus dengan kinerja dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik. (Dewantari & Indraswarawati 2021) menyatakan bahwa realisasi PAD di Kota Denpasar pada tahun 2014 hingga 2018 jika dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektifitas, analisis varian pendapatan, analisis varian belanja, menunjukkan persentase yang cukup baik pada pengelolaan keuangan di Kota Denpasar, tetapi jika dilihat dari rasio pertumbuhan dan belanja menunjukkan persentase yang kurang baik. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan anggaran pemerintah Kota Denpasar belum sepenuhnya dikategorikan baik. Dalam Penelitian ini juga menyatakan terdapat peristiwa yang terjadi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu pada tahun sebelumnya terjadi realisasi belanja daerah yang menumpuk, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah kinerja pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Denpasar sudah diperbaiki atau belum untuk tahun selanjutnya dan setelah di teliti kinerja pengelolaan anggaran Kota Denpasar sudah diperbaiki dan tidak ada realisasi belanja yang menumpuk kembali. Namun demikian pemerintah daerah Kota Denpasar dapat dilihat belum mampu memenuhi kriteria penilaian yang cukup baik dalam mengukur persentase

anggaran. Secara umum, Anggaran serta realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, serta terdapat selisih antara anggaran dengan yang direalisasikan. Secara keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Denpasar untuk setiap tahunnya terdapat selisih yang rutin serta mengalami peningkatan dan penurunan. Maka dari itu Peneliti mengangkat topik ini, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar yang lemah diharapkan dapat diukur dengan Analisis rasio-rasio keuangan.

Struktur APBD Kota Denpasar selama tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021 pada sisi Belanja Daerah dan Pendapatan Daerahnya menunjukkan kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Namun dari sisi Pendapatan Daerahnya Kota Denpasar masih didominasi oleh Pendapatan Transfer atau biasa disebut Dana Perimbangan dibandingkan dengan PAD. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran dalam kurun waktu 4 tahun yaitu 2018 hingga tahun 2021, Pada tahun 2019 realisasi belanja daerahnya lebih besar dari pada realisasi pendapatan daerahnya, Hal ini menunjukkan tingkat penggunaan PAD untuk membiayai belanja daerah masih rendah. Akibat dari jumlah realisasi belanja dan transfer lebih besar dari realisasi pendapatan maka pada tahun 2019 Pemerintah Kota Denpasar mengalami defisit sebesar Rp(61.781.798.380,86), Kemudian pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan pada Belanja Daerah dan Pendapatan Daerahnya hal tersebut terjadi karena dampak dari pandemi *Covid-19* yang membuat seluruh kegiatan di Kota Denpasar dibatasi maka dari itu belanja daerahnya menurun,

kemudian pada saat pandemi *Covid-19* salah satunya sektor pariwisata di Bali dilarang beroperasi ini menyebabkan pendapatan daerah pada tahun 2020 menurun karena pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restaurant, pajak hiburan dan lain-lain juga menurun. Data dari realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah dari Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan
Kota Denpasar Tahun 2018 – 2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah
2018	Rp 2.098.037.222.612,33	Rp 2.121.040.458.231,59
2019	Rp 2.255.312.785.830,37	Rp 2.193.530.987.449,51
2020	Rp 1.722.827.837.846,61	Rp 1.964.054.093.227,60
2021	Rp 1.925.696.066.384,40	Rp 1.996.441.141.259,54

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 – 2021

Pada Tabel 1.2 menunjukkan penjabaran dari realisasi pendapatan daerah, Dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Denpasar pada tahun 2018-2021 lebih didominasi oleh Dana Perimbangan atau dana bantuan dari pemerintah pusat dari pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) khususnya untuk tahun 2020 dan 2021.

Tabel 1. 2
Penjabaran dari Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Denpasar Tahun 2018 - 2021

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2018	Rp 940.110.334.564,11	Rp 879.456.756.672,00	Rp 301.473.366.995,48
2019	Rp 1.010.779.481.697,88	Rp 869.958.857.558,00	Rp 312.792.648.193,63
2020	Rp 731.261.280.905,53	Rp 1.120.461.025.768,16	Rp 112.331.786.553,91
2021	Rp 792.362.413.752,87	Rp 1.115.074.616.004,87	Rp 89.004.111.501,80

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 – 2021

Merujuk dari data yang diperlihatkan pada tabel 1.1 yang memperlihatkan realisasi dari belanja daerah yang lebih tinggi daripada realisasi pendapatan daerah serta tabel 1.2 yang menunjukkan pendapatan daerah yang didominasi oleh Dana Perimbangan, sehingga penelitian ditujukan untuk mencari tahu mengenai kinerja keuangan dari pemerintah Kota Denpasar.

Pemerintah daerah dalam melakukan analisis terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat mengukurnya dengan menganalisis Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran dengan Teknik Analisis Rasio Keuangan. Menurut Mahmudi (2019) adapun beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah dengan menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Pertumbuhan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki peran terbesar dalam upaya perkembangan suatu

daerah, sehingga Analisis Rasio Keuangan diharapkan dapat menjadi alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dari pemaparan latar belakang di atas penelitian ini diarahkan untuk membuktikan terkait kinerja keuangan daerah Kota Denpasar sejalan dengan perkembangan dan pembangunan yang ada, maka digunakanlah judul “Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 – 2021”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah Kota Denpasar dalam merealisasikan pembangunan daerah ditinjau dari hasil perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 – 2021?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang dinilai berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 – 2021

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk membantu melengkapi tugas akhir skripsi dan memberi ilmu tambahan mengenai bagaimana cara menghitung Rasio Keuangan yang digunakan sebagai alat analisis sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Denpasar untuk menjadi informasi dan saran sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan evaluasi sudah sejauh mana perkembangan dari kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar selama empat tahun, sehingga pemerintah terdorong untuk lebih giat meningkatkan taraf kualitas kinerjanya pada periode berikutnya.

3. Bagi Politeknik Negeri Bali

Dapat dijadikan sebagai sumber acuan untuk pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya Akuntansi Pemerintahan serta dapat dijadikan acuan yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditemukan tolak ukur dari kinerja keuangan pemerintahan sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis data pada Bab IV yaitu, Apabila dilihat dari Rasio Efektifitas, Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Rasio Keserasian Belanja Modal maka pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan Kota Denpasar pada tahun 2018 – 2021 menunjukkan nilai persentase yang baik. Namun jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Pertumbuhan maka pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan Kota Denpasar pada tahun 2018 – 2021 berada dalam kondisi kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat ketergantungan daerahnya yang tinggi diakibatkan oleh Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah sehingga tingkat kemandirian daerahnya masih kurang. Selain itu juga pemerintah daerah masih kurang dalam mengefisienkan keuangan daerahnya sehingga lebih besar belanja daerah daripada pendapatan daerah.

B. Implikasi

1. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa PAD dan dana perimbangan dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta memberikan kesimpulan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan menurunkan dana perimbangan pada daerahnya, guna memaksimalkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya.

2. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terkait dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini kinerja keuangan pemerintah daerah dapat tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki sehingga pemerintah daerah perlu melakukan analisis setiap tahunnya agar dapat mengetahui titik kelemahan dari kinerja keuangan daerahnya.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Denpasar yaitu :

1. Pemerintah Kota Denpasar diharapkan mampu mempertahankan tingkat efektifitas serta keserasian belanja daerahnya.
2. Pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat meningkatkan jumlah PAD dengan memaksimalkan pemanfaatan PAD yang sudah ada atau menciptakan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah baru sehingga kemampuan kemandirian keuangan daerah dapat juga meningkat dan ketergantungan dari pemerintah pusat semakin berkurang.
3. Pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja daerahnya dengan menyelaraskan aspek belanja yang digunakan yaitu lebih memprioritaskan belanja modal pada daerahnya.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. R., & Purbadharmaja, I. B. P. (2015). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun*, 3(6), 17–18.
- Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202–212.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE: Universitas Gajah Mada.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Dewantari, N. M. S., & ... (2021). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014 *Hita Akuntansi Dan ...*, 32, 20–41. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1488>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis UMSU*, 10(2), 1–23.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, H. (2013). *Akuntansi Sektor Publik* (3rd ed.).
- Mahsun, M. F. S. H. A. P. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005. (n.d.). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Accountability*, 6(1), 45. <https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112.

- RISWAN, R., & Affandi, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2). <https://doi.org/10.36448/jak.v5i2.545>
- Santie, E. J. G., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. (2015). Analisis penyajian laporan realisasi anggaran pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi utara. *Jurnal EMBA*, 3(2), 852–862. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8908>
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Susanto, H. (2015). *Prediksi Kemungkinan Financial Distress Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Analisis Rasio Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Syauqi, M., Siregar, H., & Syaukat, Y. (2019). Strategi Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Pengelolaan Apbd. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(1), 1–16. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i1.27540
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. (n.d.). *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.